

**DAMPAK PENEGAKAN KLAIM *NINE-DASH LINE* TERHADAP  
STABILITAS KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN DALAM  
PERIODE 2013-2020**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD MILANDHIA RASYHID**

**NPM : 1716071036**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

## **ABSTRAK**

### **DAMPAK PENEGAKAN KLAIM *NINE-DASH LINE* TERHADAP STABILITAS KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN DALAM PERIODE 2013-2020**

**OLEH**

**MUHAMMAD MILANDHIA RASYHID**

Penegakan klaim teritorial *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok memiliki dampak terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk mengintensifikasi penegakan klaim mereka pada periode 2013-2020 telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, serta menganalisis dampak penegakan klaim *Nine-Dash Line* terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Metode analisis data penelitian ini adalah kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data penelitian didapatkan dari dokumen kualitatif. Landasan teori penelitian ini adalah konsep Stabilitas Kawasan, dan teori Dampak Kebijakan Publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penegakan klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan memiliki beberapa dampak terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Kebijakan tersebut menyebabkan kemunculan sebuah fenomena distribusi kekuatan yang relatif stabil di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan berdampak negatif menyebabkan munculnya ketegangan dan konflik yang mengguncang stabilitas norma dan institusi di kawasan tersebut. Peneliti juga menemukan bahwa kebijakan tersebut relatif tidak berdampak terhadap stabilitas politik domestik serta stabilitas ekonomi dan finansial di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan hanya memiliki kemungkinan kecil untuk menyebabkan sebuah perang besar.

Kata kunci: *Nine-Dash Line*, Laut Tiongkok Selatan, Dampak Kebijakan Publik, Stabilitas Kawasan

## **ABSTRACT**

### **THE IMPACT OF *NINE-DASH LINE* CLAIM ENFORCEMENT TO THE STABILITY OF THE SOUTH CHINA SEA REGION IN THE PERIOD 2013-2020**

**BY**

**MUHAMMAD MILANDHIA RASYHID**

The Nine-Dash Line territorial claim enforcement by the People's Republic of China have an impact to the stability of the South China Sea region. China's decision to intensify their claim enforcement in the period 2013-2020 have increase tensions in the region. This research's aim is to describe and analyze the impact caused by China's policy to enforce their Nine-Dash Line claim to the stability of the South China Sea Region in the period 2013-2020. This research uses qualitative descriptive research method to describe, explore, and analyze the impact of Nine-Dash Line claim enforcement to the stability of the South China Sea region in the period 2013-2020. This research's data analysis method is data condensation, data presentation and conclusion. Research data is collected from qualitative documents. The theoretical basis of this research is the concept of Regional Stability and the theory of Public Policy Impact. The research's result shows that China's Nine-Dash Line claim enforcement policy in the South China Sea region have some impact on regional stability in the South China Sea. The policy caused the emergence of a relatively stable power distribution phenomenon in the South China Sea region and a negative impact that caused the emergence of tensions and conflict that shake the stability of norms and institution in that region. The researcher also found that the policy relatively does not have an impact to domestic political stability and economic and financial stability in the South China Sea region and only have a small chance of causing a war to erupt in that region.

Key words: Nine-Dash Line, South China Sea, Public Policy Impact, Regional Stability

**DAMPAK PENEGAKAN KLAIM *NINE-DASH LINE* TERHADAP  
STABILITAS KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN DALAM  
PERIODE 2013-2020**

**Oleh**

**MUHAMMAD MILANDHIA RASYHID**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2022**

Judul Skripsi : **DAMPAK PENEGAKAN KLAIM NINE-DASH LINE TERHADAP STABILITAS KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN DALAM PERIODE 2013-2020**

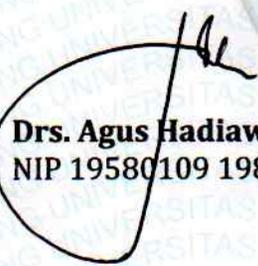
Nama Mahasiswa : **Muhammad Milandhia Rasyid**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071036**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Drs. Agus Hadiawan., M.Si.**  
NIP 19580109 198603 1 002

  
**Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**  
NIK 231801920926201

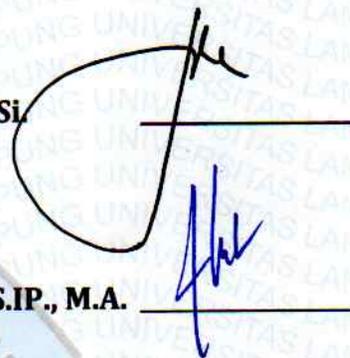
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP 19600416 198603 2 002

**MENGESAHKAN**

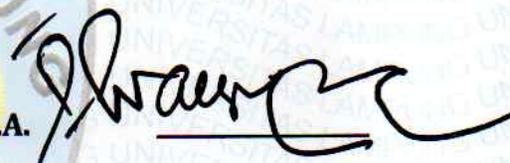
**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Agus Hadiawan., M.Si.**



**Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Oktober 2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145  
Telepon / Fax. (0721)704626 Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id>



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 September 2022  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Milandhia Rasyhid  
1716071036

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu, 10 November 1999, dari pasangan bapak Setiabudi, S.Sos dan ibu Sri Nurjanah, S.Pd. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dengan adik yang bernama Diah Alifa Zean Putri.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal Play Group yang diselesaikan di Play Group Ananda pada tahun 2004. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Sari Teladan diselesaikan pada tahun 2005. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Sekayu, Musi Banyuasin pada tahun 2011. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Unggul Sekayu pada tahun 2014. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Unggul Sekayu pada tahun 2017. Tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2018, penulis terpilih sebagai salah satu delegasi kompetisi debat dan simulasi *Roleplay International Humanitarian Law Debate & Roleplay Simulation – Indonesian Round 2018 (IHL 2018)* di Universitas Gadjah Mada.

**Motto**

*Alea Iacta Est*

*(Gaius Julius Caesar)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Segala Puji dan Syukur, Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

\* Ayah dan Bunda Tercinta

\* Adik Tersayang

\* Almarhum Baba, Kakek dan Nenek Tercinta

\* Almamater Tercinta

\* Khasanah Ilmu Pengetahuan

## SANWACANA

Puji Syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Dampak Penegakan Klaim Nine-Dash Line Terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan Dalam Periode 2013-2020” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku pembimbing kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A. selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar-seminar dan ujian terdahulu;

6. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mendukung penulis semenjak penulis menjadi mahasiswa Universitas Lampung.
7. Bapak-bapak, Ibu-ibu Dosen staf pengajar FISIP, dan karyawan FISIP Universitas Lampung, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran untuk penulisan ini.
8. Ayah, Bunda dan Adik tercinta yang tak henti-hentinya telah banyak memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP yang telah memberikan dukungan, petunjuk dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan penulis.
10. Bapak Boyke Noerdin, S.H. Staf Fungsional Diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah memberi inspirasi kepada penulis untuk masuk jurusan Hubungan Internasional dan bantuan serta dukungan beliau pada masa magang penulis.
11. Teman-teman seperjuangan skripsi, Ami, Ameru, Cyril, Devi, Farid, Rodo, Paskah, Ghina, Vincent, Indah, teman-teman Hubungan Internasional angkatan 17 yang selalu memberikan bantuan semangat dan bantuan kepada penulis.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Muhammad Milandhia Rasyhid

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>1.5. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>9</b>
<b>2.2. Landasan Teori</b> .....	<b>15</b>
<b>2.2.1. Konsep Stabilitas Kawasan (<i>Regional Stability</i>)</b> .....	<b>15</b>
<b>2.2.2. Teori Dampak Kebijakan Publik (<i>Public Policy Impact</i>)</b> .....	<b>18</b>
<b>2.3. Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>21</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
<b>3.1. Jenis Penelitian</b> .....	<b>21</b>
<b>3.2. Fokus Penelitian</b> .....	<b>21</b>

3.3. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV.....</b>	<b>27</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>4.1. Dampak Kebijakan Penegakan Klaim Nine-Dash Line Republik</b>	
<b>Rakyat Tiongkok di Kawasan Laut Tiongkok Selatan.....</b>	<b>28</b>
<b>4.1.1. Penghindaran Perang Besar.....</b>	<b>31</b>
<b>4.1.2. Distribusi Kekuatan yang Stabil.....</b>	<b>40</b>
<b>4.1.3. Stabilitas Norma dan Institusi.....</b>	<b>52</b>
<b>4.1.4. Stabilitas Politik Domestik.....</b>	<b>58</b>
<b>4.1.5. Stabilitas Ekonomi dan Finansial.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>67</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>67</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>67</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Penelitian Terdahulu.....	<b>13</b>
4.1. Anggaran Pertahanan Negara-Negara Pengklaim Laut Tiongkok Selatan dan Amerika Serikat Periode 2013-2020.....	<b>49</b>
4.2. PDB Negara-Negara Pengklaim Laut Tiongkok Selatan Periode 2013-2020.....	<b>62</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok.....	<b>3</b>
2.1 Kerangka Pemikiran.....	<b>20</b>
4.1.1 Kemampuan Proyeksi Kekuatan Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.....	<b>43</b>

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
ASBM	: <i>Anti-Ship Ballistic Missiles</i>
COC	: <i>Code of Conduct in the South China Sea</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKT	: Partai Komunis Tiongkok
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Semenjak tahun 2013, banyak pihak yang memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi di suatu perairan di kawasan Asia Tenggara. Perairan ini kini menjadi tempat dimana Brunei Darussalam, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Filipina dan Vietnam saling berusaha untuk menegakkan klaim dan hak-hak mereka di perairan tersebut. Perairan ini adalah Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah perairan dengan luas area sebesar 3.5 juta km persegi. Laut Tiongkok Selatan memiliki lebih dari 250 pulau-pulau kecil, atol, pulau karang, dangkalan, terumbu karang dan tumbukan pasir, yang sebagian besar tidak dihuni dan pada umumnya berada di bawah air saat gelombang tinggi dan bahkan tenggelam secara permanen. Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu wilayah perairan yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi di dunia. Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah transit perdagangan dengan nilai perdagangan sebesar hampir \$4 triliun tiap tahunnya. Nilai tersebut merupakan hampir sepertiga nilai total perdagangan maritim dunia. Tidak hanya itu, Laut Tiongkok Selatan diperkirakan memiliki persediaan minyak dan gas bumi dengan nilai sebesar \$2.6 triliun.<sup>1</sup> Laut Tiongkok Selatan juga merupakan tempat dimana hampir 12% dari total ikan tangkapan dunia berasal pada tahun 2015.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. Stilwell, David. (2020). The South China Sea, Southeast Asia's Patrimony, and Everybody's Own Backyard. Di *U.S. Embassy & Consulates in Indonesia*. Diakses dari <https://id.usembassy.gov/the-south-china-sea-southeast-asias-patrimony-and-everybodys-own-backyard/>

<sup>2</sup> B. Poling, Gregory. (2019). Illuminating the South China Sea's Dark Fishing Fleets .Di *Stephenson Ocean Security Project*. Diakses dari <https://ocean.csis.org/spotlights/illuminating-the-south-china-seas-dark-fishing-fleets/>

Posisinya yang sangat strategis sebagai penghubung raksasa-raksasa ekonomi dunia seperti Jepang dan Republik Rakyat Tiongkok dengan kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika dan kekayaan-kekayaan yang berada di dalam Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah wilayah yang amat menggiurkan bagi negara-negara yang memiliki klaim di perairan tersebut. Posisi dan kekayaan Laut Tiongkok Selatan juga menyebabkan Laut Tiongkok Selatan menjadi sebuah daerah yang kestabilannya harus terus dijaga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan.

Kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang dipenuhi dengan klaim wilayah perairan negara yang saling bersilangan. Sebagian besar klaim-klaim wilayah tersebut mengikuti peraturan dan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Teritorial dan Batas Landas Kontinen. UNCLOS merupakan sebuah traktat internasional yang berperan sebagai kerangka kerja hukum kelautan internasional yang mulai ditandatangani pada tahun 1982 dan berlaku penuh pada tahun 1994. Semenjak tahun 1994, UNCLOS telah berfungsi sebagai dasar hukum kelautan yang juga menyangkut klaim wilayah kelautan sebuah negara. Negara-negara pengklaim kawasan Laut Tiongkok Selatan mengikuti UNCLOS dalam mengklaim wilayah kelautan mereka dengan satu pengecualian, yakni Republik Rakyat Tiongkok yang mengklaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan atas dasar klaim sejarah melalui klaim *Nine-Dash Line*.

Klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah klaim wilayah dengan sejarah yang cukup panjang di kawasan tersebut. Klaim *Nine-Dash Line* muncul pada tahun 1947 dalam bentuk *Eleven-Dash Line* yang digunakan oleh pemerintah Republik Tiongkok untuk mengklaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Kesuksesan Republik Rakyat Tiongkok yang memukul mundur Republik Tiongkok ke Taiwan dalam Perang Sipil Tiongkok menyebabkan Republik Rakyat Tiongkok untuk mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya negara Tiongkok yang sah di dunia. Melalui deklarasi tersebut, Republik Rakyat Tiongkok pun kemudian mengklaim wilayah kelautan di Laut Tiongkok Selatan

melalui klaim *Eleven-Dash Line* yang juga digunakan oleh Republik Tiongkok. Klaim *Eleven-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok kemudian berkembang menjadi klaim *Nine-Dash Line* setelah pemerintah Republik Rakyat Tiongkok memutuskan untuk menghilangkan dua garis putus-putus setelah perjanjian Republik Rakyat Tiongkok dengan Vietnam mengenai batas wilayah kedua negara di Teluk Tonkin pada tahun 1952.<sup>3</sup>



**Gambar 1.1.** Klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok

Klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki dasar dari UNCLOS. Hal ini menyebabkan klaim *Nine-Dash Line* tidak mengikuti peraturan UNCLOS dimana Republik Rakyat Tiongkok mengklaim sebagian besar kawasan Laut Tiongkok Selatan yang mengakibatkan klaim wilayah Republik Rakyat Tiongkok berselisihan dengan klaim beberapa negara di kawasan tersebut seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam yang mengikuti peraturan UNCLOS.

<sup>3</sup> Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House. Hal.144

Beberapa perkembangan keadaan penegakan klaim wilayah negara-negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan kini berpotensi untuk mengganggu kestabilan di Laut Tiongkok Selatan. Pada 6 Mei 2009, Malaysia dan Vietnam bersama-sama mengirim sebuah *Joint Submission* ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB mengenai batas terluar landasan kontinen mereka di luar 200 Mil Laut. Republik Rakyat Tiongkok kemudian memprotes *Joint Submission* Malaysia dan Vietnam tersebut dengan menyatakan bahwa *Joint Submission* tersebut melanggar kedaulatan, hak dan yurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sesuai dengan klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok. Kejadian ini bisa dibilang sebagai saat dimana Republik Rakyat Tiongkok kini mulai berusaha untuk memastikan klaim *Nine-Dash Line* mereka ditegakkan di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Keadaan di Laut Tiongkok Selatan kemudian dipenuhi dengan kejadian-kejadian dan insiden dimana negara-negara yang memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan berusaha untuk memastikan klaim mereka bisa ditegakkan di Laut Tiongkok Selatan. Pengerahan kapal-kapal di wilayah-wilayah yang disengketakan, penegakan hukum maritim untuk memperkuat klaim wilayah, dan pengubahan nama Laut Tiongkok Selatan ke nama lain merupakan beberapa hal yang telah terjadi di Laut Tiongkok Selatan semenjak *Joint Submission* Malaysia dan Vietnam pada tahun 2009.

Pada tahun 2013, Filipina memulai sebuah kasus arbitrase internasional di bawah UNCLOS atas klaim kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok terhadap kepulauan Spratly dan dangkalan Scarborough yang berasal dari perselisihan yang terjadi antara kedua negara pada April 2012. Republik Rakyat Tiongkok menolak proses tersebut, yang kemudian memaksa pengadilan dan arbitrasinya untuk berlanjut tanpa partisipasi Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok kemudian melakukan reklamasi di kepulauan Spratly dan mulai memiliterisasi wilayah yang mereka kendalikan di Laut Tiongkok Selatan.

Pada Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Antarbangsa di Den Haag mengeluarkan keputusan yang mendukung Filipina atas kasus yang mereka buka di tahun 2013 melawan Republik Rakyat Tiongkok. Mahkamah Arbitrase

Antarbangsa memutuskan bahwa klaim hak historis Republik Rakyat Tiongkok terhadap sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan dalam klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional. Mahkamah Arbitrase Antarbangsa juga memutuskan bahwa tidak ada fitur-fitur tanah yang memenuhi persyaratan di bawah UNCLOS untuk menghasilkan sebuah zona ekonomi eksklusif dengan luas 200 Mil Laut untuk Tiongkok. Hal ini dikarenakan sebagian besar fitur tersebut merupakan hasil dari reklamasi tanah RRT yang ekstensif. Mahkamah Arbitrase Antarbangsa menyatakan bahwa RRT melanggar kewajiban mereka sebagai anggota UNCLOS dengan pernyataan bahwa kegiatan pembangunan pulau RRT merusak lingkungan laut dan tindakan-tindakan tidak aman kapal-kapal RRT meningkatkan resiko navigasi. Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka 'tidak menerima atau mengakui' keputusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa tersebut.

Semenjak penolakan mereka terhadap keputusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa mengenai *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok terus melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka di Laut Tiongkok Selatan seperti mengerahkan kapal-kapal ke perairan negara-negara lain yang juga mengklaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan dan melanjutkan reklamasi serta militerisasi pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut pun meningkatkan ketegangan yang ada di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang berpotensi memicu konflik antara negara-negara yang mengklaim wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok, terutama Republik Rakyat Tiongkok, mengklaim sebagian besar wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah perairan mereka melalui klaim *Nine-Dash Line* yang bertentangan dengan hukum-hukum internasional yang berlaku sesuai dengan UNCLOS. Fakta ini mengkhawatirkan dikarenakan Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara yang telah menandatangani UNCLOS.

Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak mengikuti keputusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa mengenai keabsahan klaimnya di Laut

Tiongkok Selatan dan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk memiliterisasi berbagai pulau alami dan buatan di Laut Tiongkok Selatan merupakan hal yang dapat merubah stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk membangun dan memperbesar berbagai pulau yang kemudian diubah menjadi instalasi militer di Laut Tiongkok Selatan semenjak tahun 2013 merupakan sebuah keputusan yang meningkatkan kekuatan militer Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan.<sup>4</sup>

Semenjak tahun 2013, Republik Rakyat Tiongkok, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, merubah pendekatan mereka terkait Laut Tiongkok Selatan dengan menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai “kepentingan nasional inti” yang mendorong mereka untuk menggunakan kebijakan yang lebih tegas dari sebelumnya demi menegakkan klaim mereka di Laut Tiongkok Selatan.<sup>5</sup> Pendekatan tersebut masih digunakan hingga tahun 2020. Dikarenakan hal-hal diatas, dampak klaim *Nine-Dash Line* terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam Periode 2013-2020 merupakan sebuah isu yang patut diteliti secara mendalam.

## 1.2. Rumusan Masalah

Klaim *Nine-dash Line* Republik Rakyat Tiongkok dalam bentuk modernnya merupakan sebuah klaim sudah diadopsi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok semenjak tahun 1952. Meskipun begitu, Republik Rakyat Tiongkok tidak berusaha keras untuk menegakkan klaim mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan hingga tahun 2013. Di bawah pemerintahan Xi Jinping, Republik Rakyat Tiongkok merubah pendekatan mereka terkait Laut Tiongkok Selatan menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk

---

<sup>4</sup> CSIS. (2021). China Island Tracker. Di *Asia Maritime Transparency Initiative*. Diakses dari <https://amti.csis.org/island-tracker/china/>

<sup>5</sup> C. Sinaga, Lidya. (2015). China's Assertive Foreign Policy in South China Sea under Xi Jinping: Its Impact on United States and Australian Foreign Policy. *Journal of ASEAN Studies*, 3(2), 133-149. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/27009-EN-chinas-assertive-foreign-policy-in-south-china-sea-under-xi-jinping-its-impact-o.pdf>

membangun dan memperbesar berbagai pulau yang kemudian diubah menjadi instalasi militer di Laut Tiongkok Selatan dan mengerahkan kapal-kapal ke perairan negara-negara lain yang juga mengklaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan semenjak tahun 2013 merupakan sebuah keputusan yang meningkatkan kekuatan militer Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil pemaparan diatas sebelumnya, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimanakah dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan menjawab hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.
2. Menganalisis dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat ikut memperkuat teori Dampak Kebijakan Publik serta konsep Stabilitas Kawasan.

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan kepada para praktisi hubungan internasional mengenai dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendeskripsikan dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.

2. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menganalisis dampak dari kebijakan penegakan klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020.

3. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan yang digunakan oleh negara-negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan dalam pertimbangan mereka untuk menyelesaikan berbagai persengketaan di kawasan ini tanpa mengubah stabilitas kawasan secara negatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang menjelaskan tentang klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok dan dampak kebijakan untuk menegakkan klaim tersebut terhadap kawasan di sekitar Laut Tiongkok Selatan, sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut memiliki tema yang sama, yakni mengenai klaim *Nine-Dash Line* dan dampak kebijakan untuk menegakkan klaim tersebut terhadap kawasan di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Pada bagian ini, peneliti berupaya mereviu enam sumber.

*Pertama*, penelitian yang telah dilakukan oleh Sigfrido Burgos Cáceres, terkait dengan kepentingan strategis Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang tertulis dalam buku *China's Strategic Interest in the South China Sea Power and Resources*. Penelitian ini menyatakan bahwa kepentingan strategis Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dapat disederhanakan sebagai proyeksi kekuatan dan keamanan sumber daya. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok bertujuan untuk memproyeksikan kekuatan militer di dalam lingkup pengaruhnya untuk meminimalisir pengaruh Amerika Serikat di kawasan Laut Tiongkok Selatan, mempromosikan perdagangan kawasan dengan sebuah penyertaan kondisi, preferensi dan persyaratan dari Tiongkok yang cukup dan untuk mengukur reaksi-reaksi negara-negara tetangga dan negara-negara kuat lama terhadap inisiatif Tiongkok di lingkungan terdekat Tiongkok.

Republik Rakyat Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengamankan sumber daya di Laut Tiongkok Selatan tidak hanya untuk penggunaan internal

namun juga untuk mendapatkan pendapatan dari ekspor dan berhubungan dengan hal-hal sebelumnya, Tiongkok ingin mengendalikan dan melindungi jalur-jalur laut perdagangan kritis yang penting untuk transportasi impor-impor dan ekspor-eksportnya.<sup>7</sup>

*Kedua*, penelitian yang telah dilakukan oleh Richard Q. Turcsa'nyi, terkait faktor pendorong ketegasan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dalam buku *Chinese Assertiveness in the South China Sea Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy*. Penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tegas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menjadi mungkin dilakukan dikarenakan power yang telah didapatkan Republik Rakyat Tiongkok dari tahun-tahun dan dekade-dekade sebelumnya. Keputusan Tiongkok untuk bereaksi tegas diduga Richard Q. Turcsa'nyi didorong oleh persepsi yang agak meningkat akan kekuatan Tiongkok dan nasionalisme tingkat tinggi Tiongkok.<sup>8</sup>

*Ketiga*, penelitian yang telah dilakukan oleh Wu Shicun, terkait penerapan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dalam penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan dalam buku *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea A Chinese perspective*. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat usaha untuk menstabilkan perselisihan di Laut Tiongkok Selatan yang sudah berlangsung lama seperti adopsi *ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the SCS* oleh negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2002. Beliau juga mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi setelah adopsi *ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the SCS* yang menimbulkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan.<sup>9</sup>

*Keempat*, penelitian yang telah dilakukan oleh Bill Hayton, terkait penerapan faktor pendorong politik internal Republik Rakyat Tiongkok dalam

---

<sup>7</sup> Cáceres, S.B. (2013). *China's Strategic Interests in the South China Sea Power and Resources*. Oxon: Routledge. hal.140-141

<sup>8</sup> Turcsa'nyi, R.Q. (2018). *Chinese Assertiveness in the South China Sea Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy*. Cham: Springer International Publishing. Hal.173-174

<sup>9</sup> Shicun, W. (2013). *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea. A Chinese Perspective*. Cambridge: Chandos Publishing. Hal. 166-167

penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan dalam buku *The South China Sea The Struggle for Power in Asia*. Penelitian ini menyatakan bahwa klaim *Nine-Dash Line* kini telah menjadi sebuah agama sekuler, sebuah mitos yang berasal dari transisi Tiongkok yang membingungkan dari kekaisaran ke republik yang akan sulit di hilangkan. Bill Hayton menyatakan bahwa terdapat beberapa dalam kepemimpinan Tiongkok yang ingin mengubah persyaratan sengketa dan mencapai sebuah akomodasi berdasarkan prinsip-prinsip UNCLOS. Namun terdapat lobi yang lebih kuat yang, dengan alasan prestise atau keuntungan, bersikeras dengan klaim maksimalis. Kepentingan domestik ini, terutama militer, perusahaan minyak dan beberapa provinsi pesisir, mengejar tindakan yang mengancam keamanan makanan, energi dan politik Asia Tenggara. Kepemimpinan Tiongkok paham bahwa mereka hanya akan kalah dalam sebuah konflik bersenjata, namun mereka melihat semua hal kecuali perang sebagai alat politik yang berguna. Beliau percaya bahwa dalam beberapa kesempatan di beberapa dekade ke depan, konfrontasi tingkat rendah akan meningkat ke periode krisis diplomasi dan militer dan bahkan sebuah konfrontasi negara superpower.<sup>10</sup>

*Kelima*, penelitian yang telah dilakukan oleh Robert D. Kaplan, terkait Penerapan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok sebagai sebuah *Rising Power* Asia dalam buku *Asia's Cauldron The South China Sea and The End of a Stable Pacific*. Penelitian ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menyerupai tindakan Amerika Serikat di pada abad 19 hingga 20. Menurut Nicholas J. Spykman, Amerika Serikat menjadi sebuah negara besar setelah mereka mengambil kendali laut Karibia Raya. Hal ini serupa dengan yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Dominasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan akan membuka jalan untuk pengaruh laut dan udara Tiongkok di seluruh pinggiran Eurasia yang bisa dilayari yakni Samudera Hindia dan Pasifik. Hal tersebut akan memungkinkan Tiongkok menjadi sebuah hegemon kawasan Indo-Pasifik. Meskipun hal tersebut tidak akan membuat Tiongkok mendominasi Belahan Bumi Timur seperti Amerika Serikat

---

<sup>10</sup> Hayton, B. (2014). *The South China Sea The Struggle for Power in Asia*. Padstow: Yale University Press. Hal. 271-273

mendominasi Belahan Bumi Barat, dominasi tersebut akan sangat membantu Tiongkok menjadi lebih dari negara yang pertama diantara yang sederajat di Belahan Bumi Timur dengan energi politik dan ekonomi cadangan untuk mempengaruhi lebih lanjut negara-negara di Belahan Bumi Barat. Laut Tiongkok Selatan saat ini adalah sebuah simpul utama dari politik kekuatan global yang penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan di seluruh dunia.<sup>11</sup>

*Keenam*, penelitian yang telah dilakukan oleh Zhiguo Gao and Bing Bing Jia, terkait sejarah klaim *Nine-Dash Line* di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini mendeskripsikan sejarah dari klaim *Nine-Dash Line* itu sendiri dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok bergantung berat pada sejarahnya yang panjang untuk membenarkan gelarnya ke kedaulatan teritorial dan yurisdiksi maritim di Laut Tiongkok Selatan, negara pengklaim lain menggunakan dan menekankan hak mereka di bawah UNCLOS. Mereka berpendapat bahwa untuk menemukan solusi, negara-negara pengklaim tak dapat kabur dari keperluan untuk menemukan keseimbangan yang cermat antara sejarah dan kenyataan saat ini dalam mencapai sebuah akomodasi di laut Tiongkok Selatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan keenam penelitian terdahulu yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa pada umumnya penelitian-penelitian sebelumnya memfokuskan penelitian kepada kebijakan Republik Rakyat Tiongkok terkait klaim *Nine-Dash Line*-nya sebagai sebuah *Rising Power* di kawasan Asia. Namun, satu literatur membahas tentang kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dalam penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Keenam literatur yang direviu diatas memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, namun juga terdapat perbedaan.

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini akan berfokus kepada dampak penegakan klaim *Nine-Dash Line* terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020, yang sejauh ini belum dilakukan

---

<sup>11</sup> Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House. Hal.54-56

<sup>12</sup> Gao, Z. and Jia, B.B. (2013). The *Nine-Dash Line* in the South China Sea: History, Status, and Implications. *The American Journal of International Law*, 107 (1), 98-124. Doi: 10.5305\_amerjintlaw.107.1.0098. Hal.123-124

secara khusus oleh para peneliti terdahulu. Untuk mempermudah dalam mengetahui komparasi dari penelitian terdahulu dan penelitian ini, berikut adalah tabel yang membandingkan topik penelitian, objek penelitian, metode penelitian, teori dan konsep, perbedaan penelitian serta hasil penelitian yang disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Topik Penelitian</b>	<b>Objek Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Teori/ Konsep</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Sigfrido Burgos Cáceres (2013)	Kepentingan Strategis Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan	Penerapan Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan	Kualitatif	Kepentingan Strategis	Fokus penelitian pada kepentingan strategis beberapa pihak dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan	Kepentingan strategis RRT adalah untuk meningkatkan pengaruh mereka di Laut Tiongkok Selatan
Richard Q. Turcsányi (2018)	Ketegasan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Sumber Energi, Politik Domestik dan Kebijakan Luar Negeri Reaktif	Penerapan faktor pendorong kebijakan tegas Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan	Kualitatif	Geostrategi dan Geopolitik	Fokus penelitian pada geostrategi dan geopolitik satu pihak dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan	Keputusan RRT untuk bereaksi tegas didorong oleh persepsi yang meningkat akan kekuatan Tiongkok serta nasionalisme tinggi RRT
Wu Shicun (2013)	Perspektif Tiongkok dalam Penyelesaian Sengketa demi Kerjasama Kawasan dan Perkembangan di Laut Tiongkok Selatan	Penerapan Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dalam Penyelesaian Sengketa di Laut Tiongkok Selatan	Kualitatif	Diplomasi	Fokus penelitian pada satu perspektif pihak dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan	Terdapat usaha untuk menstabilkan sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang sudah berjalan lama
Bill Hayton (2014)	Perebutan Kekuasaan di Asia dan	Penerapan faktor pendorong	Kualitatif	Kepentingan Nasional	Fokus penelitian pada	Bill Hayton percaya bahwa

	Laut Tiongkok Selatan	politik internal Republik Rakyat Tiongkok dalam Penyelesaian Sengketa di Laut Tiongkok Selatan			kepentingan nasional beberapa pihak dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan	dalam beberapa dekade ke depan, konfrontasi tingkat rendah akan meningkat ke periode krisis diplomasi dan militer dan bahkan sebuah konfrontasi militer
Robert D. Kaplan (2014)	Laut Tiongkok Selatan Sebagai Kuali Asia dan Akhir Sebuah Pasifik yang Stabil	Penerapan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok sebagai sebuah <i>Rising Power</i> Asia	Kualitatif	<i>Rising Power</i>	Fokus penelitian pada kebijakan Republik Rakyat Tiongkok sebagai sebuah <i>Rising Power</i> Asia	Laut Tiongkok Selatan saat ini adalah sebuah simpul utama dari politik kekuatan global yang penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan di seluruh dunia
Zhiguo Gao and Bing Bing Jia (2013)	<i>Nine-Dash Line</i> di Laut Tiongkok Selatan: Sejarah, Status, and Implikasi	Sejarah klaim <i>Nine-Dash Line</i> di Laut Tiongkok Selatan	Kualitatif	Kedaulatan	Fokus penelitian pada klaim <i>Nine-Dash Line</i>	Republik Rakyat Tiongkok bergantung berat pada sejarahnya yang panjang untuk membenarkan gelarnya ke kedaulatan teritorial dan yurisdiksi maritim di Laut Tiongkok Selatan

Sumber: Penelitian terdahulu dengan pengolahan penulis

## 2.2. Landasan Teori

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, konsep Stabilitas Kawasan (*Regional Stability*), dan teori Dampak Kebijakan Publik (*Public Policy Impact*).

### 2.2.1. Konsep Stabilitas Kawasan (*Regional Stability*)

Robert Ayson berpendapat bahwa sebuah sistem dapat disebut stabil apabila sistem tersebut memiliki kecenderungan menuju sebuah ekuilibrium – kapasitas sebuah sistem untuk bertemu ke sebuah posisi tertentu dari awalnya. Tetapi dikarenakan kondisi yang menghadapi sebuah sistem dapat berubah dengan sangat signifikan, sebuah sistem yang benar-benar stabil adalah sebuah sistem yang dapat menemukan sebuah ekuilibrium baru yang dapat dijadikan dasar operasi sebuah sistem tersebut.<sup>13</sup>

Robert Ayson menyatakan bahwa stabilitas dapat dipahami melalui dua faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah stabilitas merupakan sebuah pengukur kecenderungan menuju ekuilibrium dari sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung. Faktor kedua adalah stabilitas pada umumnya menyiratkan sebuah penghindaran dari bahaya besar yang merupakan sebuah cerminan dari konsekuensi negatif dari ketidakstabilan yang harus dihindari. Stabilitas adalah tentang suatu kondisi dan juga tentang konsekuensi apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi.<sup>14</sup>

Mengenai faktor pertama, sebuah sistem dapat disebut stabil saat sistem tersebut bisa meraih dan memelihara sebuah posisi ekuilibrium baik

---

<sup>13</sup> Ayson, R. (2005). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual Understanding. *Asian Security*, 1(2). 190-213. DOI: 10.1080/14799850490961080

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 192

merupakan suatu jenis keseimbangan, tawar-menawar, tempat istirahat, pola perilaku atau pengaturan organisasi. Beberapa pendekatan stabilitas hampir seluruhnya fokus kepada pemeliharaan ekuilibrium. Namun agar bisa benar-benar menjadi stabil, sebuah ekuilibrium harus dapat menahan guncangan dan perubahan eksternal. Saat sebuah ekuilibrium menjadi stabil sesuai dengan tuntutan diatas, ada keperluan untuk menekankan pembentukan awal ekuilibrium tersebut yakni kemampuan sebuah sistem untuk berkumpul ke posisi tertentu. Hal ini penting dikarenakan banyak aspek lingkungan keamanan Asia-Pasifik yang bersifat dinamik dan Robert Ayson berpendapat bahwa stabilitas dapat berupa sistem statik dan dinamik.<sup>15</sup> Faktor kedua dari stabilitas adalah gagasan untuk menghindari bahaya. Dalam sebagian besar kasus, ekuilibrium sistem yang stabil adalah situasi-situasi yang positif yang diinginkan terjadi. Mereka dianggap layak diperoleh dan dijaga dikarenakan biaya yang dikeluarkan apabila ekuilibrium tersebut tidak bisa dicapai atau hilang jauh lebih tinggi.<sup>16</sup>

Kedua elemen umum stabilitas tersebut dicerminkan dalam formulasi Kenneth Waltz bahwa “Stabilitas dapat diukur melalui kedamaian penyesuaian dalam sistem internasional dan dari daya tahan sistem itu sendiri.”<sup>17</sup> Terdapat dua cara dimana daya tahan dapat berhubungan dengan ekuilibrium dan penghindaran bahaya. Daya tahan tersebut dapat berupa daya tahan sebuah ekuilibrium tertentu seperti sebuah keseimbangan kekuatan antara dua negara atau lebih yang spesifik atau sebuah sistem pemerintah tertentu atau bahkan sebuah pemerintah tertentu. Ketakutan bahwa kondisi lain dapat menjadi lebih parah atau ketiadaan alternatif nyata dapat mendorong beberapa pihak untuk menganggap sebuah situasi tertentu layak distabilkan. Sebuah ekuilibrium tertentu juga bisa hanya sesuai untuk keadaan tertentu yang belum tentu bertahan lama. Agar sebuah sistem dapat benar-benar menjadi stabil, sistem tersebut membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Waltz, K.N. (1964). The Stability of a Bipolar World. *Daedalus*, 93(3) hal. 881

bergerak ke posisi ekuilibrium yang baru sesuai dengan tuntutan keadaan.<sup>18</sup>

Robert Ayson berpendapat bahwa suatu transformasi total dan kehilangan daya tahan sebuah subkomponen bisa menjadi kepentingan stabilitas keseluruhan sebuah sistem. Beliau berpendapat bahwa stabilitas hubungan antar negara Asia-Pasifik bergantung kepada ketahanan sebuah distribusi kekuatan tertentu seperti dalam keseimbangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, beliau juga berpendapat bahwa lebih sesuai untuk fokus kepada ultrastabilitas: yakni kemampuan sebuah sistem untuk bergerak dari sebuah distribusi tertentu ke distribusi baru yang juga memungkinkan sebuah pola perilaku yang stabil.<sup>19</sup>

Kedua faktor diatas juga menghubungkan stabilitas dengan faktor penting hubungan antar-negara yakni keberadaan dan daya tahan kerjasama dalam berbagai bentuknya. Robert Ayson juga menjelaskan bahwa terdapat lima jenis stabilitas yang harus diselidiki saat membahas isu-isu stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Mereka adalah:

1. Penghindaran Perang Besar
2. Distribusi Kekuatan yang Stabil
3. Stabilitas Norma dan Institusi
4. Stabilitas Politik Domestik
5. Stabilitas Ekonomi dan Finansial.

---

<sup>18</sup> Ayson, R. (2005). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual Understanding. *Asian Security*, 1(2). 190-213. DOI: 10.1080/14799850490961080. Hal. 193

<sup>19</sup> *Ibid.*

### 2.2.2. Teori Dampak Kebijakan Publik (*Public Policy Impact*)

Thomas R. Dye berpendapat bahwa dampak kebijakan merupakan keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata.<sup>20</sup> Menurut Thomas R. Dye, terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi dampak sebuah kebijakan, yakni :

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target.
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang.
4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program kebijakan.
5. Biaya tidak langsung kebijakan, termasuk hilangnya kesempatan untuk melakukan kebijakan yang lainnya.

Thomas R. Dye menyatakan bahwa dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Dalam mengukur dampak kebijakan, mengukur output aktivitas pemerintah semata seperti dana yang dikeluarkan tidak cukup untuk dapat mengukur dampak suatu kebijakan. Untuk bisa mengukur dampak suatu kebijakan, aktor pengukur harus dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah tersebut.<sup>21</sup>

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kelompok target merupakan bagian dari suatu populasi yang menjadi target suatu program. Kelompok target harus diidentifikasi dan dan efek program yang diinginkan terjadi kepada anggota kelompok ini harus ditetapkan. Thomas R. Dye menambahkan

---

<sup>20</sup> R. Dye, T. (2017). *Undertanding Public Policy Fifteenth Edition*. Pearson

<sup>21</sup> *Ibid.*

bahwa semua program dan kebijakan memiliki efek yang berbeda pada berbagai segmen populasi. Mengidentifikasi kelompok non-target yang penting untuk sebuah kebijakan merupakan proses yang sulit. Efek non-target dapat diekspresikan sebagai manfaat dan biaya.<sup>22</sup>

Thomas R. Dye menekankan bahwa aktor pengukur dampak suatu kebijakan harus mengetahui efek-efek jangka pendek dan panjang dari suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan terdapat kebijakan yang memiliki efek jangka pendek yang positif namun gagal untuk memunculkan suatu perubahan dalam masyarakat dan kebijakan yang mengalami kesulitan di awal penerapannya yang kemudian mengalami peningkatan penerimaan kebijakan tersebut dalam masyarakat setelah waktu yang lama. Thomas R. Dye berpendapat bahwa tugas menghitung dampak bersih dari suatu kebijakan publik merupakan tugas yang berat. Hal ini dikarenakan dampak bersih tersebut merupakan semua manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, dikurangi semua biaya, kini dan di masa depan. Hal tersebut dinilai belaiiau sebagai hal yang sulit dilakukan.<sup>23</sup>

### 2.3. Kerangka Pemikiran

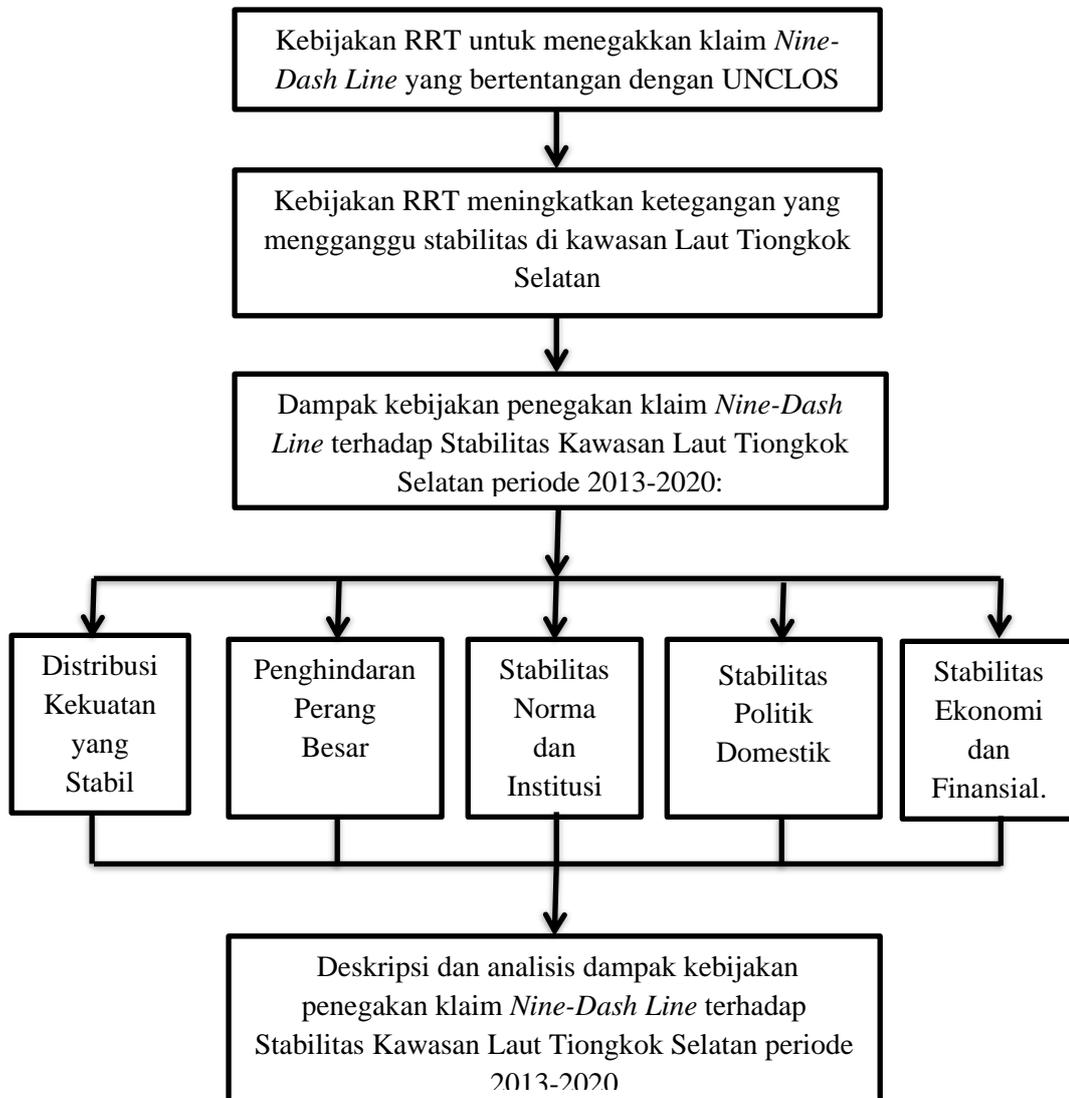
Keberadaan klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok yang bertentangan dengan UNCLOS dan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim tersebut telah meningkatkan ketegangan dalam hubungan antar negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan. Ketegangan tersebut menyebabkan kemunculan sebuah dinamika hubungan baru di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang mengganggu stabilitas kawasan tersebut. Sehingga klaim *Nine-Dash Line* memiliki dampak terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Kerangka pemikiran bertujuan untuk menjelaskan alur peneliti dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian terkait dampak kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* di Laut

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Berikut merupakan bagan untuk memahami kerangka pemikiran tersebut:



**Gambar 2.1.** Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan memahami suatu hal yang dianggap oleh sejumlah individu ataupun sekelompok orang sebagai suatu masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif biasanya menggunakan perspektif penelitian yang bersifat induktif, berfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis dampak penegakan klaim *Nine-Dash Line* Terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan Dalam Periode 2013-2020.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisa dampak penegakan klaim *Nine-Dash Line* terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Objek utama dari penelitian ini adalah negara-negara yang memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan dalam jangka waktu tahun 2013-2020. Tahun 2013-2020 dipilih sebagai tahun periode fokus penelitian disebabkan oleh eskalasi ketegasan kebijakan Republik Rakyat

---

<sup>24</sup> Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 4.

Tiongkok dalam penegakan klaim *Nine-Dash Line* saat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2013.

Penelitian ini fokus kepada dampak dari kebijakan penegakan klaim Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020, disaat intensitas kebijakan penegakan klaim tersebut meningkat, terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini menggunakan konsep Stabilitas Kawasan dan teori Dampak Kebijakan Publik untuk menjelaskan dampak klaim *Nine-Dash Line* terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Metrik pengukuran dampak klaim *Nine-Dash Line* terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Penghindaran Perang Besar

Penghindaran perang besar adalah posisi bawaan untuk stabilitas kawasan Asia-Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan kawasan Asia-Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan yang memiliki konsentrasi berat kekuatan militer yang disertai persenjataan nuklir, sengketa wilayah yang belum diselesaikan, ketegangan atas dasar sejarah, penyebaran senjata pemusnah massal yang menjadi sumber ketidakstabilan kawasan ini.<sup>25</sup> Keberhasilan kawasan Laut Tiongkok Selatan untuk menghindari perang besar antar negara akan berdampak kepada stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan.

#### 2. Distribusi Kekuatan yang Stabil

Distribusi Kekuatan yang Stabil adalah sebuah hal yang penting untuk kestabilan sebuah kawasan. Distribusi kekuatan yang stabil akan memunculkan sebuah situasi dimana satu negara tidak dapat mendominasi suatu kawasan dan mendeklarasikan perang kepada negara lain. Kawasan Asia Pasifik saat ini relatif stabil dengan keberadaan

---

<sup>25</sup> United States Department of Defense. (1998). “*The United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region*”. Hal. 62.

Amerika Serikat sebagai penyeimbang Republik Rakyat Tiongkok, namun kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok dapat menyebabkan perubahan dalam distribusi kekuatan di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

### 3. Stabilitas Norma dan Institusi

Stabilitas Norma dan Institusi mengacu kepada kestabilan hubungan negara-negara besar yang sebagian berasal dari tingkat keterlibatan di antara mereka dalam sistem yang tidak terlihat seperti anarki dan lebih seperti masyarakat negara yang dicetuskan Hedley Bull.<sup>26</sup> Institusi dapat meliputi praktek-praktek formal atau tidak formal yang mempertemukan ekspektasi-ekspektasi negara. Melalui penyediaan cara-cara untuk mengkoordinasikan perilaku dan ekpektasi di suatu kawasan, organisasi tersebut meningkatkan prospek kerjasama antar negara. Dalam mencerminkan suatu nilai-nilai umum, institusi dan norma tersebut dapat menunjukkan legitimasi ke praktek antara negara.

### 4. Stabilitas Politik Domestik

Stabilitas Politik Domestik negara-negara yang berada di dalam suatu kawasan merupakan hal yang penting untuk stabilitas kawasan tersebut. Ketidakstabilan politik domestik dapat memunculkan guncangan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Sesuai dengan masukan Young (1989), ketidakstabilan politik dapat terletak di tiga tingkat yakni:

- a. Ketidakstabilan bangsa secara keseluruhan.
- b. Ketidakstabilan di tingkat rezim.
- c. Ketidakstabilan di tingkat pemerintahan atau kelompok yang memerintah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ayson, R. (2005). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual Understanding. *Asian Security*, 1(2). 190-213. DOI: 10.1080/14799850490961080. Hal. 198

<sup>27</sup> Young, T. (1989). "The State and Instability in Southern Africa" di Caroline Thomas and Paikiasothy Saravanamuttu, eds., *The State and Instability in the South*. Basingstoke: Macmillan. Hal. 112–113.

## 5. Stabilitas Ekonomi dan Finansial

Stabilitas Ekonomi dan Finansial merupakan bagian penting dari stabilitas kawasan Asia-Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan. Sebagai kawasan dengan negara-negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi dan sektor finansial dapat menjadi pendukung stabilitas kawasan. Hal tersebut dapat dicapai melalui interdependensi ekonomi yang meningkatkan biaya yang harus dibayar suatu negara apabila negara tersebut mendeklarasikan perang.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk membantu mencari data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian dengan berbagai sumber-sumber data yang terkait dengan masalah. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil olahan penelitian sebelumnya. Sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti perjanjian, deklarasi dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian luar negeri yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Adapun sumber-sumber data penelitian ini meliputi *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China* ([https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/)), *Ministry of Foreign Affairs of Brunei Darussalam* (<http://www.mfa.gov.bn/>), *Ministry of Foreign Affairs of Malaysia* (<https://www.kln.gov.my/>), *Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines* (<https://dfa.gov.ph/>), *Ministry of Foreign Affairs of Vietnam* (<https://www.mofa.gov.vn/en>) dan lain-lain. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak penegakan klaim Nine-Dash Line Terhadap Stabilitas Kawasan Laut Tiongkok Selatan Dalam Periode 2013-2020.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi usaha-usaha untuk membatasi penelitian, mengumpulkan observasi dan wawancara secara terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk mencatat informasi<sup>28</sup>. Penelitian ini menggunakan metode *purposefully select* data yang diteliti untuk meminimalisir adanya data yang tidak relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini terlebih dahulu telah menentukan lokasi penelitian (Bandar Lampung), aktor (Aktor tingkat negara yakni Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam) dan peristiwa (perselisihan penegakan klaim wilayah). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative document*) yang berupa dokumen publik yang dipublikasikan oleh Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam di website resmi masing-masing serta artikel dan laporan media massa untuk menambah data yang diperlukan.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Sebuah penelitian memerlukan sebuah sistem analisis data agar proses penelitian dalam berjalan secara baik untuk mencegah terjadinya sebuah kesalahan. Metodologi penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif-Kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan dampak kebijakan penegakan klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan pada periode 2013-2020. Data kualitatif digunakan untuk mendukung, validasi dan menjelaskan data yang dikumpulkan dari pengaturan yang sama. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dan Johnny Saldana<sup>29</sup> yakni:

---

<sup>28</sup> Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 253.

<sup>29</sup> Miles, Matthew B & Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: Edition 3*. London: SAGE Publications.

#### a. Kondensasi Data

Aktivitas ini merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mentransformasi data yang muncul dalam bentuk korpus penuh dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Penulis memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan data yang didapat dari catatan tertulis dari lapangan, dokumen dan material-material empiris lainnya. Data tersebut kemudian di analisa untuk dipertajam, dipilah, difokuskan, dan diatur hingga kesimpulan akhir dapat dibentuk dan diverifikasi.

#### b. Penyajian Data

Aktivitas ini merujuk pada proses mengorganisir dan mengompres kumpulan informasi yang memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Penulis menyajikan data untuk membantu penulis lebih mudah memahami permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan. Hal dilakukan melalui pembuatan kumpulan informasi yang terorganisir dan padat yang membantu penulis menarik kesimpulan dan tindakan. Data yang ditampilkan berupa gambar dan tabel yang menginterpretasikan gambaran dampak kebijakan penegakan klaim Nine-Dash Line Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan pada periode 2013-2020 secara sederhana dan jelas.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Aktivitas ini merujuk pada proses penggambaran dan verifikasi kesimpulan. Penulis memaparkan temuan dari data yang telah dikondensasikan dan tersaji sebelumnya kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut sebagai hasil temuan dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penegakan klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan memiliki beberapa dampak terhadap stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Dampak tersebut diketahui adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan tidak memiliki dampak yang relatif kuat yang dapat menyebabkan pecahnya perang besar di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan negara-negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan yang lain yakni Malaysia, Indonesia, Filipina dan Vietnam memiliki pengalaman dan juga kelihaihan berdiplomasi yang cukup untuk dapat menghadapi tindakan agresif dari Republik Rakyat Tiongkok tanpa memicu pecahnya sebuah perang yang besar.

b. Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan memiliki dampak yang relatif cukup signifikan dalam menciptakan sebuah distribusi kekuatan yang cukup stabil. Hal ini dikarenakan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok tersebut memicu kekhawatiran dan respon dari negara-negara rivalnya seperti Amerika Serikat yang tidak ingin Republik Rakyat Tiongkok memiliki pengaruh yang lebih kuat di kawasan Laut Tiongkok

Selatan. Amerika Serikat yang memiliki kepentingan untuk memastikan klaim *Nine-Dash Line* tidak menjadi kenyataan menjadi salah satu sekutu dan penjamin keamanan Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam dari tindakan agresif Republik Rakyat Tiongkok yang dapat menggunakan kekuatan mereka yang jauh lebih besar dari negara-negara tersebut untuk menjamin negara hegemon di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

c. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak mengikuti UNCLOS di Laut Tiongkok Selatan melalui klaim *Nine-Dash Line* telah menimbulkan gejolak dan ketegangan pada hubungan negara-negara pengklaim di Laut Tiongkok Selatan. Semua negara pengklaim di Laut Tiongkok Selatan kecuali Republik Rakyat Tiongkok mendasarkan klaim teritorial mereka pada UNCLOS. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak mengikuti seluruh ketentuan UNCLOS sebagai norma dan institusi kelautan di kawasan Laut Tiongkok Selatan telah menyebabkan munculnya ketegangan dan konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* mereka memiliki dampak yang relatif sangat kuat yang mengguncang stabilitas norma dan institusi di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk tidak mengikuti hasil keputusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa mengenai sengketa wilayah Tiongkok dengan Filipina semakin mengganggu stabilitas norma dan institusi di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

d. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan relatif tidak memiliki dampak terhadap stabilitas politik domestik negara-negara yang terlibat di dalam sengketa wilayah di kawasan tersebut.

e. Keputusan Republik Rakyat Tiongkok untuk menegakkan klaim *Nine-Dash Line* mereka di kawasan Laut Tiongkok Selatan relatif tidak memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi dan finansial di kawasan tersebut. Hubungan ekonomi antara Republik Rakyat Tiongkok dan

negara-negara pengklaim lainnya terus menguat meskipun ketegangan muncul di kawasan tersebut sebagai akibat dari kebijakan Republik Rakyat Tiongkok.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kelima sub-variabel tersebut merupakan metrik-metrik yang digunakan oleh penulis untuk membantu menganalisis dampak kebijakan penegakan klaim *Nine-Dash Line* oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Kelima sub-variabel, yakni penghindaran perang besar, distribusi kekuatan yang stabil, stabilitas norma dan institusi, stabilitas politik domestik dan stabilitas ekonomi dan finansial tersebut berhasil membantu penulis menemukan, mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan penegakan klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok terhadap stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan dalam periode 2013-2020. Kebijakan penegakan klaim *Nine-Dash Line* Republik Rakyat Tiongkok berdampak cukup signifikan terhadap distribusi kekuatan yang stabil dan stabilitas norma dan institusi di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan negara-negara pengklaim lainnya untuk meningkatkan usaha untuk menyelesaikan penyusunan *Code of Conduct in the South China Sea* dengan Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok merupakan sebuah negara kuat dengan ambisi memperluas pengaruh mereka di dunia internasional sehingga negara-negara pengklaim lainnya harus dapat menyesuaikan diplomasi mereka terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam harus bisa menegakkan dan berpegang teguh kepada norma dan hukum internasional serta menjalin kerjasama dengan negara-negara saingan Republik Rakyat Tiongkok seperti Amerika Serikat dan Jepang dan pada saat

yang sama mengakomodasi kepentingan Republik Rakyat Tiongkok sebagai sebuah *rising power* di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

ASEAN. ASEAN-China Economic Relation. Di ASEAN. Diakses dari <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/asean-china-economic-relation/>

Ayson, R. (2005). Regional Stability in the Asia-Pacific: Towards a Conceptual Understanding. *Asian Security*. 1(2). 190-213. DOI: 10.1080/14799850490961080

B. Poling, Gregory. (2019). Illuminating the South Tiongkok Sea's Dark Fishing Fleets. Di Stephenson Ocean Security Project. Diakses dari <https://ocean.csis.org/spotlights/illuminating-the-south-Tiongkok-seas-dark-fishing-fleets/>

C. Sinaga, Lidya. (2015). Tiongkok's Assertive Foreign Policy in South Tiongkok Sea under Xi Jinping: Its Impact on United States and Australian Foreign Policy. *Journal of ASEAN Studies*, 3(2), 133-149. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/27009-EN-Tiongkoks-assertive-foreign-policy-in-south-Tiongkok-sea-under-xi-jinping-its-impact-o.pdf>

Cáceres, S.B. (2013). *Tiongkok's Strategic Interests in the South Tiongkok Sea Power and Resources*. Oxon: Routledge

China International Import Expo. (2021). China-ASEAN bilateral trade annually growth rate hits 16.5% from 1991 to 2020: customs. Di China International Import Expo. Diakses dari <https://www.ciie.org/zbh/en/news/exhibition/news/20210913/29410.html>

CNBC. (2019). Vietnam protests to China about local boat sinking in South China Sea. Di CNBC. Diakses dari <https://www.cnbc.com/2019/03/22/vietnam-protests-to-china-about-local-boat-sinking-in-south-china-sea.html>

CNBC Indonesia. (2020). Parah! Kapal China Masuk RI, Klaim Natuna, Diusir Tak Mau. Di *CNBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200914062050-4-186492/parah-kapal-china-masuk-ri-klaim-natuna-diusir-tak-mau>

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

CSIS. (2020). Malaysia Picks a Three-Way Fight in the South China Sea. Di *Asia Maritime Transparency Initiative*. Diakses dari <https://amti.csis.org/malaysia-picks-a-three-way-fight-in-the-south-china-sea/>

CSIS. (2021). Tiongkok Island Tracker. Di *Asia Maritime Transparency Initiative*. Diakses dari <https://amti.csis.org/island-tracker/Tiongkok/>

CSIS. (2022). Chinese Power Projection Capabilities in the South China Sea. Di *Asia Maritime Transparency Initiative*. Diakses dari <https://amti.csis.org/chinese-power-projection/>

Chow-Bing, N. (2020). South China Sea Tensions: Malaysia's Strategic Dilemma. Di *South China Sea Strategic Situation Probing Initiative*. Diakses dari <http://www.scspi.org/en/dtfx/1591153812>

Del Callar, M. (2020, April 8). Philippines calls out China on ramming of Vietnamese vessel. *GMA News*. Diakses dari <https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/733212/philippines-calls-out-china-on-ramming-of-vietnamese-vessel/story/>

Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines. (2020). STATEMENT OF SECRETARY OF FOREIGN AFFAIRS TEODORO L. LOCSIN, JR. ON THE 4TH ANNIVERSARY OF THE ISSUANCE OF THE AWARD IN THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION. Di *Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines*. Diakses dari <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/27140-statement-of-secretary-of-foreign-affairs-teodoro-l-locsinn-jr-on-the-4th-anniversary-of-the-issuance-of-the-award-in-the-south-china-sea-arbitration>

Gao, Z. and Jia, B.B. (2013). The *Nine-Dash Line* in the South Tiongkok Sea: History, Status, and Implications. *The American Journal of International Law*. 107 (1). 98-124. Doi: 10.5305\_amerjintelaw.107.1.0098.

General Administration of Customs of the People's Republic of China. (2020). Review of China's Foreign Trade in 2019 . Di *General Administration of Customs of the People's Republic of China*. Diakses dari <http://english.customs.gov.cn/Statics/f63ad14e-b1ac-453f-941b-429be1724e80.html>

Giang, H. (2020). Viet Nam's response to US Secretary of State's position on East Sea. Di *Socialist Republic of Viet Nam Government News*. Diakses dari <http://news.chinhphu.vn/Home/Viet-Nams-response-to-US-Secretary-of-States-position-on-East-Sea/20207/40779.vgp>

Harun, H.N. (2020, Juli 16). Hishammuddin: South China Sea issue requires peaceful resolution. Di *New Straits Times*. Diakses dari <https://www.nst.com.my/news/nation/2020/07/609154/hishammuddin-south-china-sea-issue-requires-peaceful-resolution>

Hayton, B. (2014). *The South Tiongkok Sea The Struggle for Power in Asia*. Padstow: Yale University Press.

Hayton, B. (2020). 'The South China Sea in 2020' Statement before the U.S.-China Economic and Security Review Commission hearing on "U.S.-China Relations in 2020: Enduring Problems and Emerging Challenges". Di U.S.-China Economic and Security Review Commission. Diakses dari [https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-09/Hayton\\_Testimony.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-09/Hayton_Testimony.pdf)

Heywood, A. (2011). *Global Politics*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron The South Tiongkok Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House.

LaGrone, S. (2020, Juli 6). U.S., Chinese Navies Hold Dueling Exercises in the South China Sea. *USNI News*. Diakses dari <https://news.usni.org/2020/07/06/u-s-china-navies-hold-dueling-exercises-in-the-south-china-sea>

Latiff, R. (2020, Mei 15). Chinese ship leaves Malaysian waters after month-long South China Sea standoff. *Reuters*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-security-malaysia/chinese-ship-leaves-malaysian-waters-after-month-long-south-china-sea-standoff-idUSKBN22R1SN>

Long, D. (2020, Juli 13). Oil Company Pulls Out of Vietnamese Oil Field as China Puts the Squeeze on Vietnam. *Radio Free Asia*. Diakses dari <https://www.rfa.org/english/news/vietnam/oil-china-07132020173206.html>

Miles, Matthew B & Michael Huberman dan Jhonny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: Edition 3*. London: SAGE Publications.

Ministry of Foreign Affairs of Brunei Darussalam. (2020). 20 July 2020- STATEMENT ON THE SOUTH CHINA SEA. Di *Ministry of Foreign Affairs of Brunei Darussalam*. Diakses dari <http://www.mfa.gov.bn/Lists/Press%20Room/news.aspx?id=841>

Mogato, M. (2017, Mei 19). Duterte says China's Xi threatened war if Philippines drills for oil. *Reuters*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-philippines-china/duterte-says-chinas-xi-threatened-war-if-philippines-drills-for-oil-idUSKCN18F1DJ>

Pearson, J., & Torode, G. (2018, Maret 27). Exclusive: Satellite images reveal show of force by Chinese navy in South China Sea. *Reuters*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-defence/exclusive-satellite-images-reveal-show-of-force-by-chinese-navy-in-south-china-sea-idUSKBN1H3135>

Pilipino Banana Growers & Exporters Association, Inc. (2015). Philippine Banana Exports to China: Dealing with Sanitary and Phytosanitary Concerns. Di Asia Pacific Pathways to Progress Foundation, Inc. Diakses dari <https://appfi.ph/resources/presentations/31-philippine-banana-exports-to-china-dealing-with-sanitary-and-phytosanitary-concerns>

R. Dye, T. (2017). *Undertanding Public Policy Fifteenth Edition*. Pearson.

R. Stilwell, David. (2020). The South Tiongkok Sea, Southeast Asia's Patrimony, and Everybody's Own Backyard. Di U.S. Embassy & Consulates in Indonesia.

Diakses dari <https://id.usembassy.gov/the-south-Tiongkok-sea-southeast-asias-patrimony-and-everybodys-own-backyard/>

Reuters. (2020). Chinese ships intruded into Malaysian waters 89 times in four years, report says. Di *Reuters*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-china-southchinasea-idUSKCN24F17U>

Rodriguez, J.E. (2017, Agustus 2). Repsol says drilling suspended on Vietnam oil block disputed by China. *Reuters*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-vietnam-idUSKBN1AI27D>

Shicun, W. (2013) - *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South Tiongkok Sea. A Chinese Perspective*. Cambridge: Chandos Publishing.

Stashwick, S. (2019). Chinese Vessel Rams, Sinks Philippine Fishing Boat in Reed Bank. Di *The Diplomat*. Diakses dari <https://thediplomat.com/2019/06/chinese-vessel-rams-sinks-philippine-fishing-boat-in-reed-bank/>

Thayer, C. (2017, Juni 29). Is a New China-Vietnam Maritime Crisis Brewing in the South China Sea?. *The Diplomat*. Diakses dari <https://thediplomat.com/2017/06/is-a-new-china-vietnam-maritime-crisis-brewing-in-the-south-china-sea/>

The Permanent Mission of Malaysia to the United Nations. (2020). 2020\_07\_29\_MYS\_NV\_UN\_002\_OLA-2020-00373.pdf . Di *UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea*. Diakses dari [https://www.un.org/Depts/los/clcs\\_new/submissions\\_files/mys\\_12\\_12\\_2019/2020\\_07\\_29\\_MYS\\_NV\\_UN\\_002\\_OLA-2020-00373.pdf](https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mys_12_12_2019/2020_07_29_MYS_NV_UN_002_OLA-2020-00373.pdf)

Turcsa'nyi, R.Q. (2018). *Chinese Assertiveness in the South Tiongkok Sea Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy*. Cham: Springer International Publishing.

United Nations. (2022). United Nations Convention on the Law of the Sea. Di United Nations Treaty Collection. Diakses dari [https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=\\_en#EndDec](https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en#EndDec)

United States Department of Defense. (1998). *The United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region*.

US Embassy in Laos. (2020). Statement by Secretary Michael R. Pompeo, U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea. Di *US Embassy in Laos*. Diakses dari <https://la.usembassy.gov/statement-by-secretary-michael-r-pompeo-u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/>

Waltz, K.N. (1964). The Stability of a Bipolar World. *Daedalus*, 93(3)

Young, T. (1989). "The State and Instability in Southern Africa" di Caroline Thomas and Paikiasothy Saravanamuttu, eds., *The State and Instability in the South*. Basingstoke: Macmillan.

Xie, E. (2020, Maret 27). China extracts 861,400 cubic metres of natural gas from 'flammable ice' in South China Sea. *SCMP*. Diakses dari <https://www.scmp.com/news/china/society/article/3077156/china-extracts-861400-cubic-metres-natural-gas-flammable-ice>